KEMENTERIAN HUKUM
KANTOR WILAYAH BALI
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAH (SOPAP)

NOMOR SOP	**W.20 - 2556 .OT.02.02 Tahun 2025**
TANGGAL PEMBUATAN	**14 Mei 2025**
TANGGAL REVISI	
TANGGAL EFEKTIF	**14 Mei 2025**
DISAHKAN OLEH	**KEPALA KANTOR WILAYAH** **Wahyu Eka Putra** **NIP 198105222000121002**
NAMA SOP :	**PENGGUNAAN AKUN ZOOM**

DASAR HUKUM :	**KUALIFIKASI PELAKSANA :**
1 Undang-undang (UU) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 2 Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	1. Mampu mengoperasikan Komputer 2. Memiliki kemampuan terkait Aplikasi Zoom
KETERKAITAN:	**PERALATAN / PERLENGKAPAN :**
1 SOP Persuratan	1. Surat / Nota Dinas / Disposisi 2. Komputer 3. Jaringan Internet
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :**
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik maka proses penggunaan akun dan link zoom menjadi terhambat	Disimpan Sebagai Dokume

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

SOP PENGGUNAAN AKUN ZOOM

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		Kepala Bagian TU dan Umum	Ketua Tim Teknologi Informasi pada Bagian TU dan Umum	Pelaksana Teknologi Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima surat permintaan peminjaman akun zoom dari divisi/bidang lain dan memberi disposisi kepada pelaksana				Nota Dinas permintaan penggunaan akun zoom	5 Menit	Disposisi Kabag	
2	Menelaah disposisi Kabag Tata Usaha dan Umum dan menugaskan pelaksana untuk melakukan pengecekan ketersediaan akun dan link zoom.				Disposisi Kabag	5 Menit	Penunjukan pengecekan ketersediaan akun dan link zoom	
3	Melakukan pengecekan ketersediaan Akun dan Link zoom dan mengetik nota dinas Penggunaan Akun Zoom				Penunjukan pengecekan ketersediaan akun dan link zoom	5 Menit	konsep Nota Dinas	Nota Dinas berupa pemberitahuan link zoom apabila tersedia dan informasi penjadwalan ulang apabila link zoom tidak tersedia pada hari dan tanggal dimaksud.
4	Meneliti konsep/draft nota dinas ke divisi/bidang yang membutuhkan akun zoom dan meneruskan ke Kabag Tata Usaha dan Umum		T Y		konsep Nota Dinas	5 Menit	Konsep Nota Dinas yang telah diteliti	
6	Menyetujui nota dinas penggunaan akun dan link zoom				Konsep Nota Dinas yang telah diteliti	5 Menit	Nota Dinas penggunaan akun zoom	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi